



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak tumbangnya rezim Soeharto pada tahun 1998, Indonesia mengalami masa reformasi, dimana rakyat bisa terlibat langsung dalam aktivitas politik di DPR atau MPR. Karena pergantian sistem pemerintahan, banyak wajah-wajah baru bermunculan menduduki kursi pemerintahan. Proses pemilihan presiden dan wakil presiden kala itu juga berubah, menjadi dipilih langsung oleh rakyat, yang kemudian mengangkat nama Abdurrahman Wahid dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai presiden menggantikan B.J. Habibie.

Sampai saat ini, suasana demokrasi di Indonesia semakin kental dengan semakin banyaknya calon-calon wakil rakyat, baik di tingkat pusat maupun daerah yang dapat dipilih langsung oleh rakyat. Dari camat, lurah, walikota, bupati, gubernur, sampai presiden. Karena sistem demokrasi ini pula, Indonesia harus melakukan rotasi kepemimpinan, dalam hal ini presiden, setiap 5 tahun sekali. Pada tahun 2014 ini merupakan masa dimana rakyat harus menentukan kembali presiden dan wakil presiden yang terbaik untuk memimpin Indonesia.

Ada 15 partai politik yang menjadi peserta pemilu 2014, dengan 12 partai politik, dan 3 partai lokal Aceh. Beberapa nama calon juga mulai bermunculan, seperti Aburizal Bakrie dari Partai Golkar, Surya Paloh dari Partai Nasdem, Wiranto dari Partai Hanura, Prabowo dari Partai Gerindra, dan masih banyak lagi. Namun ada juga beberapa partai politik yang sampai saat ini masih menyimpan

atau merahasiakan siapa calon presidennya pada 2014 mendatang, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Berdasarkan survei yang dilakukan Lembaga Klimatologi Politik (LKP) pada 12-18 Agustus 2013 di 33 propinsi, nama Jokowi kembali unggul. Hasil survei tersebut menyatakan Jokowi unggul dengan perolehan suara 19,6%, selanjutnya Wiranto dengan 18,5 persen, Prabowo Subianto (15,4), Jusuf Kalla (7,6), Aburizal Bakrie (7,3 persen), dan Megawati (6,1). Dahlan Iskan (3,4), Rhoma Irama (3,4), Mahfud Md. (3,3), Hatta Rajasa (2,5), dan Surya Paloh (2,4). Tokoh lainnya 1,3 persen. Sebanyak 9,2 persen responden mengaku belum punya pilihan.

Jokowi merupakan kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dibawah pimpinan Megawati Soekarno Putri. Kiprahnya di dunia perpolitikan mulai terdengar semenjak terpilihnya menjadi walikota Solo selama 2 periode berturut-turut. Selama menjabat sebagai walikota Solo, Jokowi membawa beberapa perubahan, seperti melakukan *rebranding* Solo, dengan mengubah slogan kota solo menjadi “*Solo: The Spirit of Java*”. Langkahnya cukup tegas dan progresif, ia berhasil merelokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari tanpa menimbulkan kericuhan. Jokowi juga berperan dalam proses perdamaian bagi Keraton Surakarta, dimana kedua putera Paku Buwono XII saling berebut kekuasaan sepeninggalan ayahnya. Sayangnya, di tahun kedua, periode kedua karirnya sebagai walikota, ia harus dipindahtugaskan menjadi Gubernur Jakarta, di bawah naungan PDIP.

Jokowi merupakan sosok yang fenomenal, karena segala aktivitas kesehariannya selalu menimbulkan kontroversi sehingga menarik untuk diinformasikan kepada rakyat. Mulai dari pembangunan rumah susun, relokasi PKL Tanah Abang, lelang jabatan bagi lurah dan camat, revitalisasi waduk Pluit, normalisasi waduk Ria Rio dan sekitar 80 sungai di Jakarta, pembangunan MRT, peremajaan dan penambahan armada Trans Jakarta, peremajaan Kopaja, transparansi anggaran dan publikasi via media sosial terkait rapat yang dilakukan pemerintahan DKI Jakarta, dan masih banyak lagi. Namun semua prestasi dalam satu tahun masa jabatannya itu mengundang kontra ketika namanya kemudian diwacanakan sebagai calon presiden dari PDIP pada 2014. Hal itu dikarenakan Jokowi merupakan sosok pemimpin baru yang dianggap sukses memimpin Kota Solo. Solo bisa dikatakan sebagai kota kecil dengan tingkat keragaman masyarakat yang sangat minim, lain halnya dengan Jakarta, yang memiliki masyarakat yang sangat heterogen. Jokowi bukanlah orang lama di Jakarta, dan tidak sedikit yang meragukan kapasitasnya untuk maju sebagai presiden, ketika jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta belum teruji. Pro dan kontra memang selalu ada, bahkan ditubuh PDIP sendiri. Ada beberapa faksi yang bersilang pendapat untuk tetap mengusung Mega sebagai presiden dan Jokowi sebagai wakilnya.

Berbagai media, baik cetak, online, radio, dan televisi belakangan ini intens membahas orang nomor satu di Jakarta itu. Pasalnya, setelah rakernas PDIP di Ancol pada 6-8 September 2013 lalu, Jokowi dianggap sebagai calon kuat untuk maju sebagai calon presiden dari PDIP. Ketua Umum PDIP, Megawati

Soekarnoputri memang belum menyebutkan secara tegas siapa calon presiden dari partai banteng tersebut, namun dari hasil rakernas, disebutkan beberapa kriteria untuk maju sebagai calon presiden dari PDIP, yaitu keturunan Jawa, dan pernah memimpin daerah. Walaupun banyak kader PDIP dengan kriteria tersebut, namun suara mayoritas yang hadir pada rapat tersebut merujuk pada Jokowi.

Dewasa ini, pers merupakan bagian yang tak terpisahkan dari demokrasi. Bahkan kehadirannya bisa disebut sebagai pilar ke-4 demokrasi, setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Meskipun tidak terdaftar dalam sistem politik secara formal, namun pers memiliki peran yang cukup penting dalam mempengaruhi stabilitas suatu bangsa. Pers berfungsi sebagai pengawas gerak roda perpolitikan, yang memberikan informasi secara berimbang, cerdas, serta menjadi verifikator dalam peredaran informasi di masyarakat. Pers juga dapat menjadi alat kontrol sosial, karena itu kebebasan pers di suatu negara menjadi tolok ukur kualitas demokrasi di suatu negara.

Salah satu media yang menjadikan hasil rakernas itu menjadi suatu liputan yang dibahas secara terperinci adalah Majalah TEMPO. Dalam TEMPO edisi 9–15 September 2013, diangkat sebuah tema mengenai “Di Panggung Punggong Partai Banteng”. Nampak jelas di halaman depan Majalah TEMPO, Jokowi tengah menunggang sebuah banteng menggunakan pakaian adat betawi berwarna putih, sambil tersenyum. Lalu tepat di sebelah kanan banteng tersebut berdiri Megawati mengenakan baju merah, sedang menarik tali kemudi banteng itu, dengan raut wajah datar, sambil menengok ke kanan. Terdapat tulisan di samping kiri banteng tersebut yaitu “Menimang Jokowi”.

Pada halaman dalam, terdapat rubrik yang membahas secara intens terkait potensi Jokowi untuk diajukan sebagai kandidat calon presiden dari PDIP. Rubrik itu adalah laporan utama. Laporan utama merupakan laporan mendalam tentang isu-isu utama baik tentang ekonomi, sosial, politik, atau hukum.

TEMPO merupakan majalah berita mingguan, yang berusaha menerapkan standar tinggi jurnalisme dalam meliput peristiwa dan menuliskan beritanya secara tajam, cerdas, dan berimbang (www.tempo.co/about/). Berdiri sejak tahun 1971, dan hadir sebagai majalah independen, yang tidak memiliki afiliasi dengan pemerintah, tidak menjadikan TEMPO sebagai mahaan yang aman-aman saja. TEMPO pernah 2 kali mengalami pembredelan pada tahun 1982 dan 1994 karena dianggap terlalu tajam mengkritik rezim orde baru.

Majalah lain yang hampir serupa dengan TEMPO adalah GATRA. Hanya saja, dari segi usia, GATRA masih terbilang baru, yaitu pada tahun 1994. Penulis memilih majalah TEMPO sebagai bahan analisis dibandingkan majalah lainnya dengan dua alasan, *pertama*, sebagai majalah politik yang sudah berdiri cukup lama, dengan tingkat elektabilitas yang cukup baik (dilihat dari kemampuannya bersaing hingga saat ini, di tengah semakin banyaknya majalah yang bermunculan), jauh sebelum pemilihan presiden, Majalah TEMPO mewacanakan sosok potensial, Jokowi untuk maju sebagai calon presiden melalui laporan utamanya, *kedua*, TEMPO menuliskan bahwa berita yang mereka hadirkan adalah berita yang berimbang. Sementara penulis melihat ada pembingkaiian terhadap sosok Jokowi dalam pemberitaan terkait Rakernas PDIP. Jokowi dalam

pembingkaihan Majalah TEMPO seperti *The One and Only* tokoh yang mampu memimpin Indonesia.

Dalam penelitian ini, penulis berusaha menganalisis isi teks melalui pendekatan Analisis *Framing* Robert N. Entman pada rubrik laporan utama yang ada pada majalah TEMPO edisi 9-15 September 2013

1.2 Pertanyaan Penelitian

- Bagaimana Majalah TEMPO edisi 9-15 September 2013 membingkai sosok Jokowi dalam rubrik laporan utama terkait Rakernas PDIP?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui bagaimana Majalah TEMPO edisi 9-15 September 2013 membingkai sosok Jokowi dalam rubrik laporan utama terkait Rakernas PDIP

1.3.2 Manfaat Penelitian

Ada 2 manfaat dari penelitian ini, manfaat akademis dan manfaat praktis, yaitu:

1.3.2.1 Manfaat Teoretis

Menambah kajian tentang media massa terkait analisis *framing* Robert N. Entman dalam Majalah TEMPO yang berkaitan dengan calon presiden dari suatu partai politik di Indonesia.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi landasan pemahaman tentang bagaimana suatu media massa di Indonesia khususnya majalah membingkai sosok tokoh

politik yang akan menjadi calon presiden dari suatu partai politik. Bagi Majalah TEMPO, sekiranya penelitian ini berguna sebagai masukan dalam menyempurnakan pemberitaanya.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini hanya membahas bagaimana pembingkaian sosok Jokowi pada rubrik laporan utama Majalah TEMPO edisi 9-15 September 2013.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian: Rumah peneliti (Bekasi)

Waktu Penelitian : Awal September 2013 – Awal Januari 2014

UMMN